

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN
PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan pelantikan Pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan kembali Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada masing-masing unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada masing-masing unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Ketentuan pada Lampiran I Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

NAMA DAN JABATAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

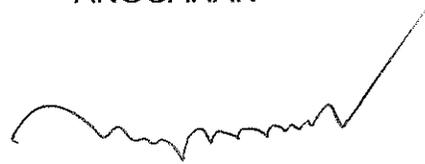
No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
1.	Estu Retno Yulianti, S.E. NIP. 19810725 201502 2 001 Calon Auditor	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Inspektorat
2.	Mirna Medita Endikasari, S.E. NIP. 19860112 201012 2 001 Kepala Subbagian Anggaran	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
3.	Intan Dana Lestari, Amd NIP. 19900312 201402 2 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Umum dan Keuangan

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
4.	Resa Anggriani, S.Psi NIP. 19860709 201012 2 001 Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
5.	Desi Kartika, S.H. NIP. 19891212 201211 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
6.	Anastasia Citra Puspita, S.E. NIP. 19850528 201012 2 001 Kepala Seksi Kemitraan Non Infrastruktur	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
7.	Indah Suci Pratiwi, S.E. NIP. 19860602 201012 2 001 Kepala Seksi Kesempatan Usaha	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
8.	Eva Nurdinna Agustini, A.Md. NIP. 19800816 201012 2 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
9.	Febrita Sidabalok, S.T. NIP. 19810202 201402 2 001 Penelaah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
10.	Sugianto, S.T. NIP. 19820408 201012 1 001 Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
11.	Anatasia, S.Psi., M.M. NIP. 19881217 201012 2 001 Kepala Seksi Tata Kelola Pengelola Pengadaan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Profesi
12.	Yohana Surat Payon Philips, S.Psi. NIP. 19821126 201012 2 001 Kepala Seksi Lembaga Pelatihan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pelatihan Kompetensi
13.	Mia Adhi Paramitha, S.E. NIP. 19840127 201012 2 001 Kepala Seksi Evaluasi dan Survailen	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi
14.	Afri Dian Setiyani, S.T. NIP. 19850424 201502 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah I
15.	Mochammad Andhika Rangga Lazuardi, S.E. NIP. 19821101 201012 1 001 Kepala Seksi Wilayah Sulawesi	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah II
16.	Inamawati Mastuti Dewi, S.H. NIP. 19900814 201402 2 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Agustus 2016
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan